

Pajak Kita, Energi Sang Juara

Pajak Bertutur Tingkat
Perguruan Tinggi

KemenkeuTepercaya

PERNAH DENGAR

Indonesia Emas ?



INDONESIA EMAS 2045

Tahun 2045 Indonesia berusia 100 tahun. Saat itu, usia kalian sekitar 37-39 tahun dan kalianlah yang memegang kemudi.



INDONESIA EMAS 2045

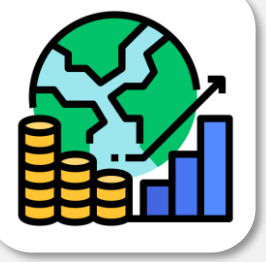
"Prospek besar, namun ada prasyaratnya"

Prospek



Demografis

± **324** Juta penduduk
± **52%** Umur produktif
75% Hidup di perkotaan
80% Berpenghasilan menengah



Ekonomi

1. Terbesar ke-4 di dunia
2. Pendapatan per kapita US$29,300
3. Struktur ekonomi lebih produktif
4. Sektor jasa yang maju

Prasyarat



Prasyarat

1. Infrastruktur yang memadai
2. SDM yang berkualitas tinggi
3. Kemampuan adopsi teknologi
4. Pembangunan daerah yang baik
5. Kebijakan ekonomi yang baik
   - *resource (sound budget)*
   - *macro stability*
   - *political stability*

Sumber: Bappenas, Visi Indonesia Emas 2045



Apa yang dibutuhkan **Generasi Emas?**

- Penguasaan Keterampilan Digital & AI;
- Berpikir Kritis & Pemecahan Masalah Kompleks;
- Komunikasi & Kolaborasi Global;
- Integritas dan Etika Kerja;
- Ketahanan Mental (Resilience);
- Kepemimpinan Berkelanjutan;
- Pengalaman Multidisiplin;
- Jiwa Kewirausahaan (Entrepreneurship);
- Kesehatan Fisik dan Mental.



Semua mimpi itu butuh

ENERGI

Darimana energinya?

Sumber energi **Indonesia** =

APBN

(Anggaran pendapatan dan belanja negara)

Stop kontak raksasa milik negara

Seluruh energi pembangunan dikumpulkan di satu tempat, lalu disalurkan kembali ke seluruh pelosok Indonesia termasuk ke sekolah ini.



Sebenarnya apa APBN itu ?

> *“**APBN** adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

*APBN mencakup semua **pendapatan dan pengeluaran** pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi*

Fungsi **APBN**

1



Otorisasi

Menghimpun **pendapatan** dan melaksanakan **belanja** Negara

2



Perencanaan

Pedoman alokasi anggaran sepanjang tahun

3



Pengawasan

Memastikan penggunaan anggaran **sesuai ketentuan**

Fungsi **APBN**

4



Alokasi

Mengarahkan sumber daya **untuk pembangunan** misalnya: infrastruktur, pendidikan, kesehatan

5



Distribusi

Memastikan **pemerataan kesejahteraan** misalnya: subsidi dan program sosial

6



Stabilisasi

sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan **keseimbangan perekonomian**

Pengelolaan **APBN 2026**



Postur **APBN 2026**

Belanja Negara

Rp3.786,5 T

- Belanja Pemerintah Pusat : **Rp3.136,5 T**
- Transfer Ke Daerah : **Rp650,0 T**

Pendapatan Negara

Rp3.147,7 T

- Perpajakan : **Rp2.692,0 T**
  1. Pajak : **Rp2.357,7 T**
  2. Bea Cukai : **Rp334,3 T**
- PNBP : **Rp455,0 T**
- Hibah : **Rp0,7 T**

Pembiayaan

Rp638,8 T



Sumber: Informasi RAPBN 2026

dari mana

Pendapatan Negara

?



Sumber-sumber **Penerimaan Negara**

1 Pajak

Penerimaan negara melalui pajak merupakan satu-satunya **sumber penerimaan Negara yang minim risiko** , serta dapat **meningkatkan kemandirian bangsa**

2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP **terbesar bersumber dari penjualan Sumber Daya Alam**. Yang tidak merugikan alam

3 Hibah

Hibah **bentuknya tidak pasti**. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada hibah luar negeri terkadang membawa konsekuensi berupa **keterikatan agenda** atau **kepentingan politik tertentu dari pemberi hibah**

4 Pinjaman Dalam Negeri/ Luar Negeri

Utang luar negeri dan dalam negeri berpotensi menjadi beban bagi APBN, karena **utang luar negeri dan dalam negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya**.

Rencana Pendapatan Negara
Tahun 2026

74,9%
Pajak Rp2.357,7 T

10,62%
Bea Cukai Rp334,3 T

14,46%
PNBP Rp455 T

0,02%
Hibah Rp0,7 T

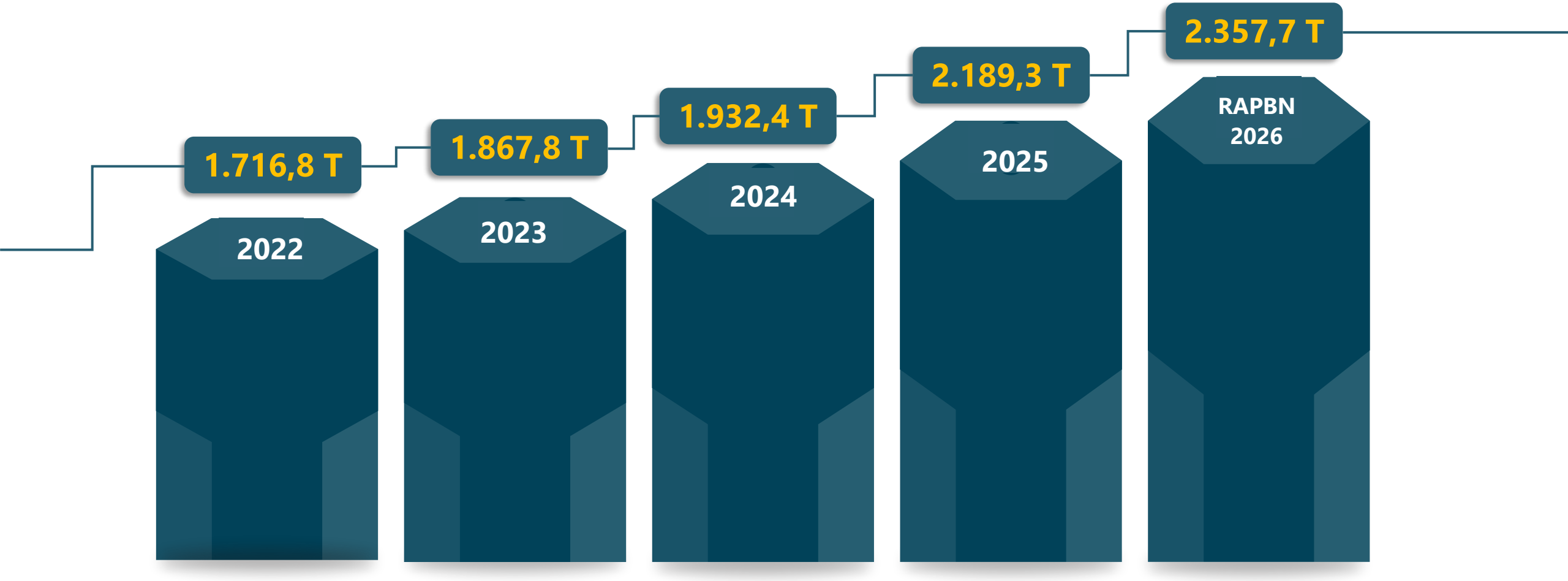


"Ibarat kandungan air dalam tubuh manusia, pajak menyumbang lebih dari 70% penerimaan negara"

Sumber : Data RAPBN 2026

Penerimaan Pajak

dalam APBN 2022-2026



Sumber : Data Kementerian Keuangan

PAJAK

Merupakan **tulang punggung**
Pembangunan Indonesia



UNTUK APA

BELANJA NEGARA

Rp. 3.786,5 T

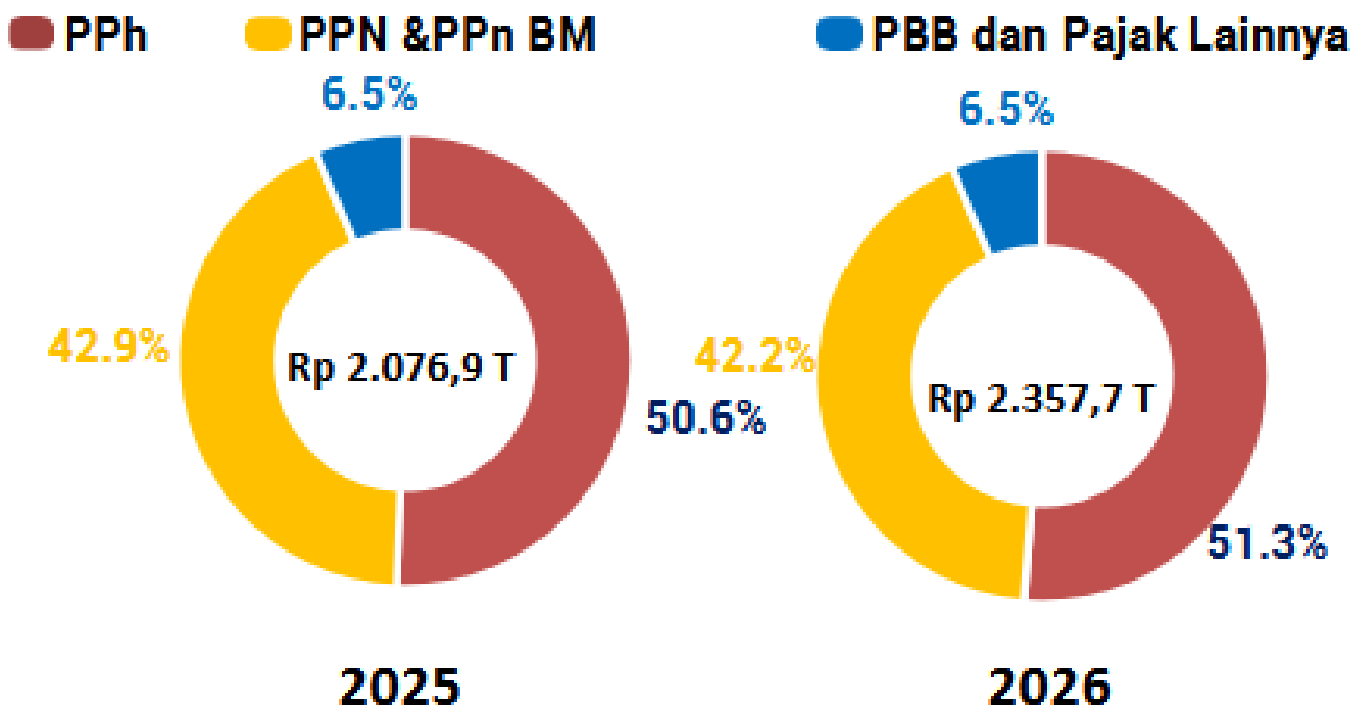



1 JUTA UANG PAJAK KITA
TRANSFER DAERAH
Rp 151.152,79
KEMENTERIAN
DAN LEMBAGA
Rp 373.726,56
PENDIDIKAN
Rp 200.000,00
KETAHANAN PANGAN
Rp 41.006,90
KETAHANAN ENERGI
Rp 33.176,88
PERTAHANAN
DAN KEAMANAN
Rp 105.959,44
SUBSIDI
Rp 19.852,99
KESEHATAN
Rp 60.861,82
KEAGAMAAN
Rp 14.262,61

Penerimaan Pajak

dalam APBN 2022-2026

Kontribusi Per JenisPajak



Penerimaan PPh, dipengaruhi:

- ✓ Proyeksi pertumbuhan ekonomi
- ✓ *joint program* serta peningkatan efektifitas pengawasan fokus kepada HWI dan WP grup

PBB dan Pajak Lainnya, dipengaruhi:

- ✓ Objek pajak PBB-P3 dan fluktuasi harga komoditas
- ✓ Aktivitas transaksi bermeterai
- ✓ Kemudahan pembayaran WP

Penerimaan PPN & PPnBM, dipengaruhi:

- ✓ Efektivitas implementasi UU HPP
- ✓ Konsumsi domestik

Sumber: Informasi RAPBN 2026

Anggaran Pendidikan



Tahukah Kamu?

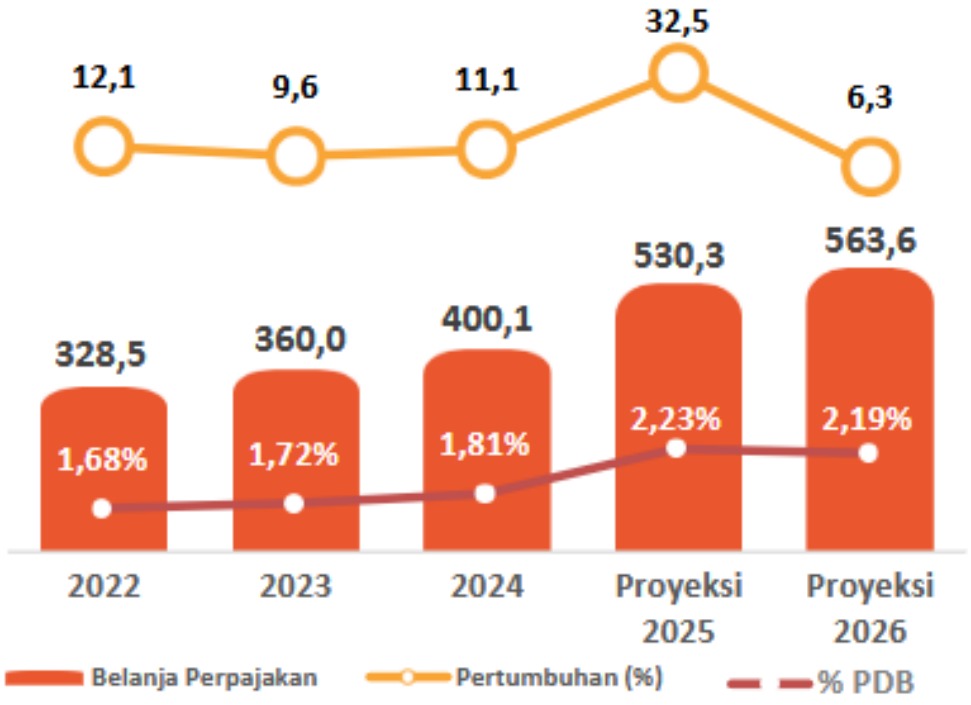
Jumlah anggaran Pendidikan Indonesia itu harus paling sedikit 20% dari APBN, hal ini diatur langsung di UUD 1945



Sumber: Informasi RAPBN 2026

Insentif Pajak
dalam APBN 2022-2026

Insentif Perpajakan



Belanja Perpajakan diarahkan untuk:

- **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat** a.l. melalui PPN dibebaskan untuk barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, angkutan umum, dan hasil perikanan
- **Mendukung UMKM** a.l. melalui Fasilitas PPh final dan PPN tidak wajib dipungut bagi pengusaha kecil (omzet < Rp4,8 miliar/tahun)
- **Menarik Investasi & Dunia Usaha** a.l.melalui *tax holiday dan tax allowance*

Sumber: Informasi RAPBN 2026

Belanja Pos Pendidikan



Bunyi UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4)

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional"



Sumber: Informasi APBN 2026

Belanja Pos Kesehatan



Tahukah Kamu?

Presiden memiliki program unggulan di bidang kesehatan yang dilaksanakan mulai tahun 2025 yaitu pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus TB, dan Pembangunan RS Daerah kelas D/ D pratama menjadi kelas C.

Sumber: Informasi APBN 2026



Belanja Pos Perlindungan Sosial



Bunyi UUD 1945 Pasal 34 Ayat (2)

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"



Sumber: Informasi APBN 2026

Belanja Pos Perlindungan Sosial



Tahukah Kamu?

Termasuk di dalam Program Perlinsos adalah Bantuan Iuran PBI JKN

Program Keluarga Harapan (PKH) untuk **10,0 juta** KPM

Program Bansos Sembako untuk **18,3 juta** KPM

Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi kelompok rentan, korban penyalahgunaan NAPZA, ODHIV, anak, yatim piatu (YAPI), penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan total sebanyak **75,3 ribu** orang

Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana melalui BNPB

Penyaluran **Subsidi Jenis BBM Tertentu** sebanyak **19.162.5** ribu kiloliter

Penyaluran **Subsidi LPG Tabung 3 kg**

Penyaluran **Subsidi Bunga KUR** untuk **6,1 juta** debitur

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk **1,8 juta** KPM di desa

Sumber: Informasi APBN 2026

Apakah Pernah Mendengar

Belanja Pajak



Apa yang dimaksud Belanja Perpajakan?

Belanja perpajakan (***tax expenditure***)
adalah **penerimaan perpajakan** yang **tidak dikumpulkan**
atau **berkurang** akibat adanya **ketentuan khusus** yang
berbeda dari sistem pemajakan secara umum

Belanja perpajakan lazim juga disebut **insentif pajak** yang bentuknya antara lain pembebasan pajak (*tax holiday*), pengurangan pajak penghasilan (*tax allowance*) dan segala bentuk pengecualian atau perbedaan pengenaan perpajakan dari ketentuan yang berlaku

Insentif Pajak memiliki tujuan tertentu seperti mendorong investasi, UMKM, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Bunga Rampai Kebijakan Fiskal 2018

Insentif Pajak di Bidang Pendidikan



Jasa Pendidikan

Pemerintah memberikan perlakuan khusus sehingga jasa penyelenggaraan pendidikan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Buku Pelajaran Umum,Kitab, dan Buku Pelajaran Agama

Buku Pelajaran Umum,Kitab, dan Buku Pelajaran Agama dibebaskan dari pengenaan PPN

Beasiswa

Beasiswa yang memenuhi ketentuan, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (PPh) bagi penerimanya

Insentif Pajak di Bidang Pendidikan

Sisa Lebih Badan/Lembaga Nirlaba Pendidikan/Litbang

Sisa lebih dikecualikan dari objek PPh sepanjang dipakai untuk pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian

Syarat :

a. pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi yang memenuhi persyaratan tertentu; dan
b. dilakukan paling lama 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.



Insentif Pajak di Bidang Pendidikan



Super Deduction Vokasi dan/atau Litbang

Wajib Pajak badan yang menyelenggarakan praktik kerja, pemagangan dan/atau penelitian/pengembangan yang memenuhi ketentuan, mendapat fasilitas **pengurangan penghasilan bruto** yaitu sebesar :

- paling tinggi **200%** dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk Super Deduction Vokasi dan
- paling tinggi **300%** untuk Litbang

Contoh Insentif Pajak

SPP Sekolah

Semua jasa pada dasarnya kena PPN. SPP Rp500.000 seharusnya dibayar Rp555.000. Karena jasa pendidikan dibebaskan, yang dibayar tetap Rp500.000. Selisih Rp55.000 itulah insentif pajak.

Buku Pelajaran

Buku seharga Rp120.000 seharusnya menjadi Rp133.200 setelah PPN. Karena buku pelajaran dibebaskan PPN, harganya tetap Rp120.000 negara merelakan Rp13.200 agar buku tetap terjangkau

Beasiswa

Setiap tambahan kemampuan ekonomis pada dasarnya objek PPh. Namun beasiswa dikecualikan, sehingga beasiswa Rp6.000.000 diterima utuh tanpa potongan sepeser pun

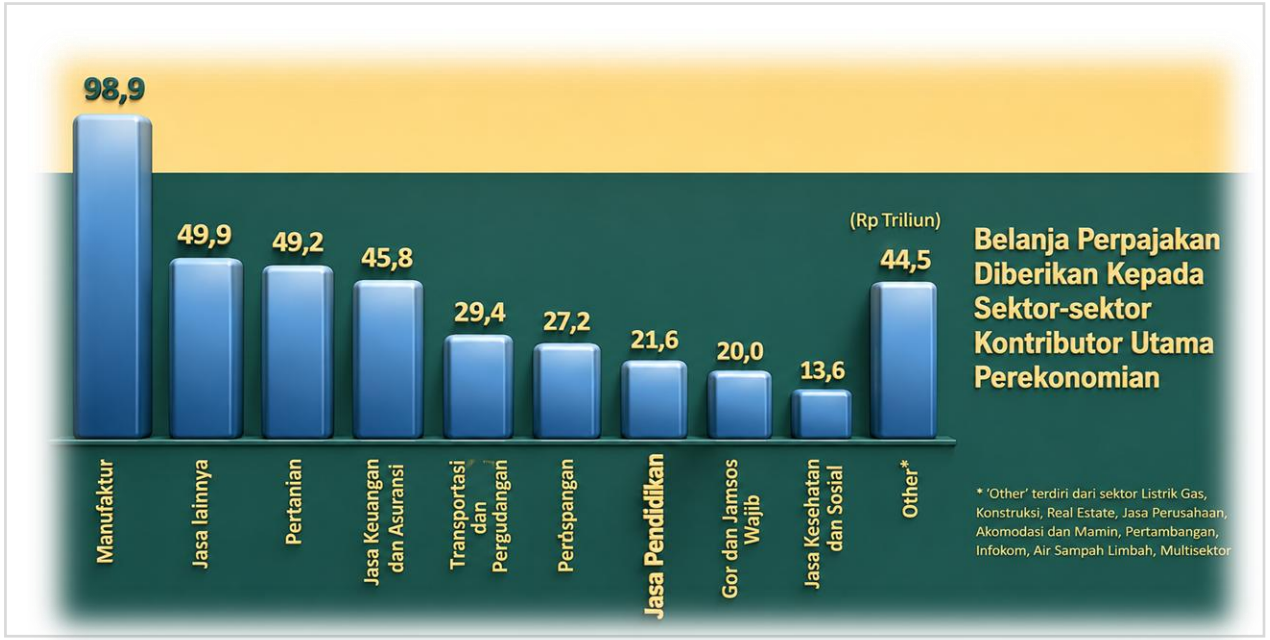


Insentif Pajak Sektor Jasa Pendidikan

Rp21,6 T

Dari total belanja perpajakan **Rp400,1 triliun**, sebesar **Rp21,6 triliun** dinikmati **sektor jasa pendidikan**.

Nilai ini terus naik setiap tahun — dari Rp18,7 T (2021) menjadi Rp21,6 T (2024), dan diproyeksikan Rp29,5 T pada 2027.



Contoh:

Jasa pendidikan dibebaskan dari pengenaan PPN

Buku pelajaran umum,kitab, dan buku pelajaran agama dibebaskan dari pengenaan PPN

Beasiswa dikecualikan dari objek PPh bagi penerimanya

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan 2024, Kemenkeu

Definisi Pajak

“ **Pajak** adalah **kontribusi wajib kepada negara** yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang **bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang**, dengan **tidak mendapatkan imbalan secara langsung** dan **digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat** ”

Pasal 1 ayat (1) UU KUP



Fungsi Pajak

Peran Pajak dalam Kehidupan Bernegara

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Ini adalah fungsi utama pajak, yaitu sebagai sumber pendanaan utama negara. Uang yang dikumpulkan dari wajib pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan nasional.

Penjelasan: Pajak masuk ke dalam kas negara sebagai pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tanpa pajak, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tidak bisa berjalan.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi ini menempatkan pajak sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Pemerintah bisa menaikkan atau menurunkan tarif pajak untuk mengendalikan perilaku masyarakat atau pasar.

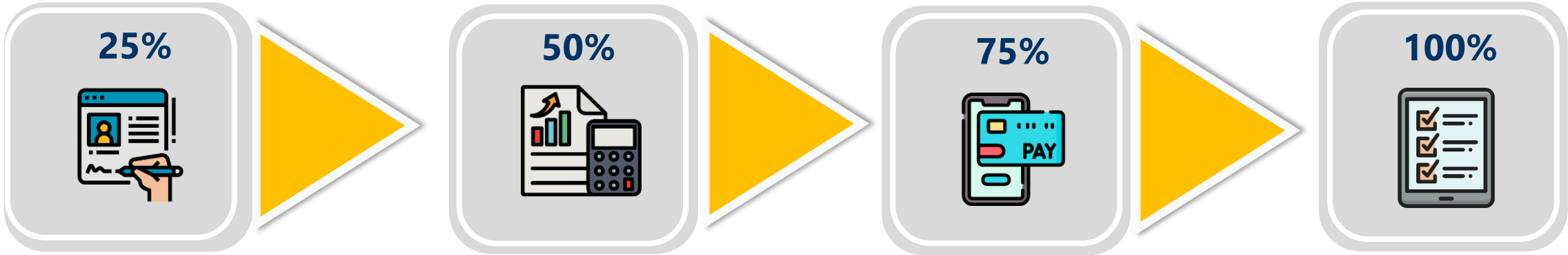
Penjelasan: Jika pemerintah ingin membatasi sesuatu, pajak akan dinaikkan. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mendorong sesuatu, pajak akan diturunkan atau diberikan insentif.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak berfungsi untuk memeratakan pendapatan masyarakat demi menjembatani kesenjangan (jurang pemisah) antara si kaya dan si miskin.

Penjelasan: Uang yang dipungut dari masyarakat yang mampu (berpenghasilan tinggi) akan disalurkan kembali dalam bentuk program-program yang membantu masyarakat kurang mampu.

Alur Kewajiban Perpajakan



1. Daftar

Mandaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi syarat objektif dan subjektif

2. Hitung

Menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak

3. Bayar

Membayar pajak yang terutang atau yang dipotong atau pungut tepat waktu

4. Lapor

Melaporkan Surat Pemberitahuan dengan Benar, Lengkap, Jelas dan ditandatangani

TEMPAT MEMBAYAR PAJAK

METODE PEMBAYARAN PAJAK ANDA



KASIR BANK



LOKET KANTOR POS



INTERNET BANKING



MESIN ATM



TERMINAL EDC



INGAT! KANTOR PAJAK BUKAN TEMPAT MEMBAYAR PAJAK, TAPI TEMPAT MELAPOR PAJAK ANDA!

FAKTANYA

Mencapai target penerimaan pajak itu tidaklah mudah

MENGAPA ?

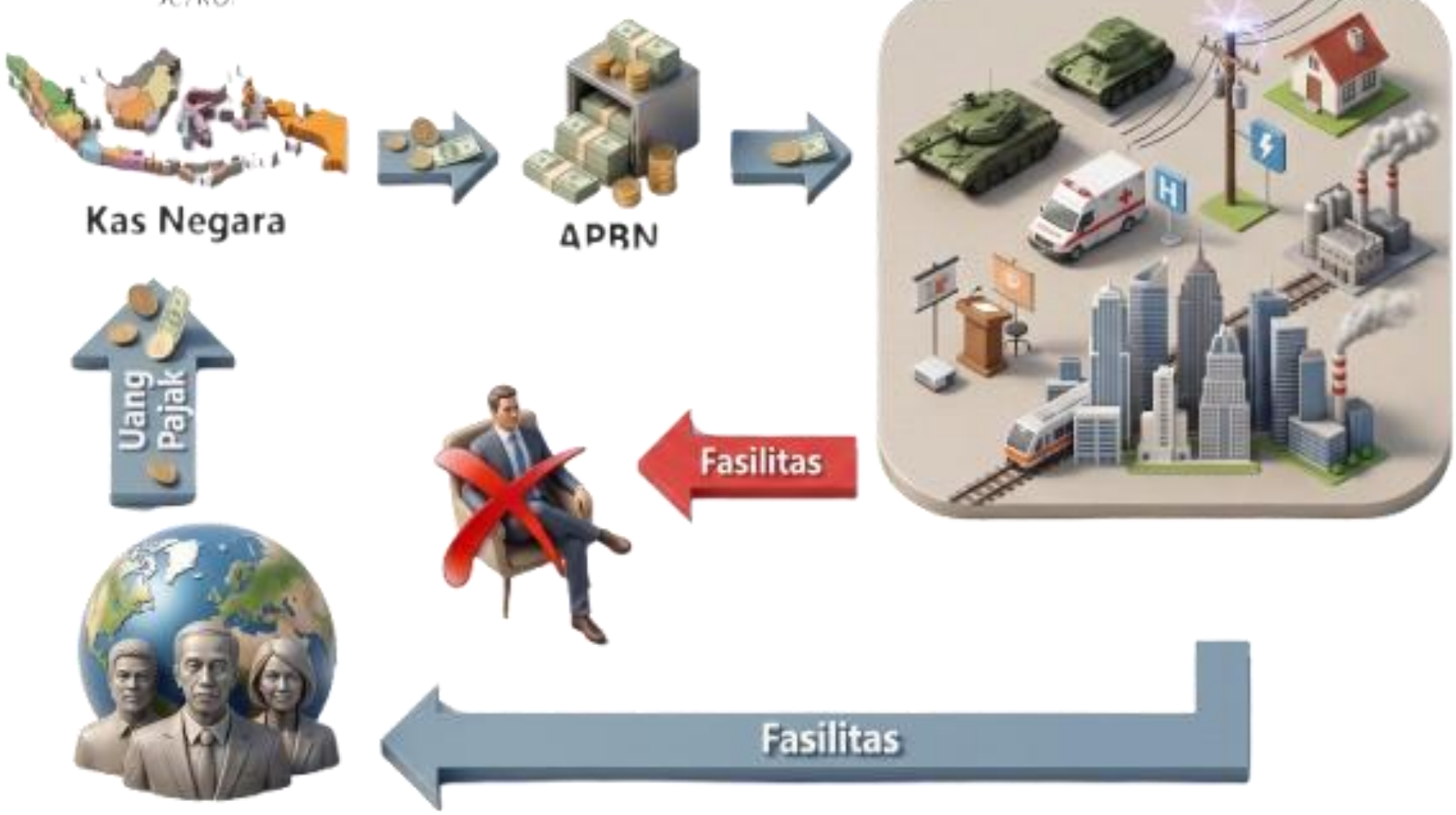
Salah satunya karena masih terdapat Warga Negara Indonesia yang seharusnya melapor dan membayar pajak namun **tidak patuh** dalam melaporkan dan membayar pajaknya.

FREE RIDER PROBLEM



individu atau kelompok yang menikmati manfaat, layanan, atau hasil, **tanpa berkontribusi**

FREE RIDER




STOP FREE RIDER!
SEMUA HARUS
BERKONTRIBU
NO CONTRIBUTION
=
NO VOTE

Apakah Pernah Mendengar

Tax Ratio



Rasio Pajak (*Tax Ratio*)

Rasio Pajak adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan nilai produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Rasio ini digunakan untuk mengukur, persentase yang berhasil dikumpulkan menjadi pajak dari seluruh nilai ekonomi yang berputar di Indonesia.

$$\text{Rasio Pajak} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Produk Domestik Bruto}}$$



Rasio Pajak Indonesia yang Masih *Challenging*



Rasio pajak diolah dari berbagai sumber

Tingkat **Kepatuhan** Wajib Pajak **Masih Rendah**

dari **10** Orang Indonesia Yang **BEKERJA**



1 Terdaftar Sebagai **WAJIB PAJAK**

dari **10** Orang **WAJIB PAJAK**



6 Menyampaikan **SPT**

dari **20** Orang **WAJIB PAJAK**



1 Orang Membayar **PAJAK**



Bagaimana cara meningkatkan

Kepatuhan Pajak?

Lalu apa yang
bisa kita lakukan sebagai
generasi muda ?



Kalian adalah
calon generasi emas.
Pada tahun 2045, kalian akan berada di usia produktif dan diproyeksikan mendominasi sekitar
60% dari proyeksi jumlah penduduk nanti (324 juta).

Sumber: https://drive.google.com/file/d/1BvGbA2pC7O8pGKiYmRHT9KWVD7FSQbG5/view

Bayangkan jika
60% generasi emas tersebut membayar pajak,

maka **APBN** kita akan **meningkat** berkali-kali lipat. Pembangunan negara akan melesat, fasilitas diberikan negara akan semakin bermanfaat.



Bayangkan
Jika seluruh **generasi emas** tersebut **membayar pajak,**



APBN kita akan meningkat berlipat-lipat. Pembangunan negara akan melesat, fasilitas yang kita rasakan akan sangat banyak.



Maka impian kita menjadi negara yang maju

TIDAKLAH SEBATAS ANGAN



Bayangkan kalian sampai di tahun 2045

Tulis komitmen kalian untuk mewujudkan **Indonesia Emas 2045!**

Pemerintah

Non-Pemerintah





Katakan.....



1. Vandalisme
2. Sebar Hoax
3. Narkoba
4. Kriminal

Berlomba-lomba meraih prestasi

Dalam berlomba-lomba meraih prestasi adalah wujud nyata mengisi pembangunan dan mengharumkan nama baik negara tercinta dan wujud ***Kreativitas Siswa.***



Mahasiswa, Agen Perubahan

- **Pajak Tumbuh:** dari kesadaran dan kepatuhan generasi muda.
- **Indonesia Maju:** bangsa kuat menghadapi tantangan global bila fiskalnya sehat.

> Mahasiswa diharapkan menjadi ***role model* kepatuhan pajak** di masyarakat



Mahasiswa, Energi Generasi Juara

- Memaksimalkan "Energi" (Fasilitas) **dengan Prestasi**
- **Menolak Mentalitas Free Rider** dan Merawat Fasilitas Publik
- Menjadi **Agen Kesadaran**
- Mempersiapkan Diri Menjadi **Tulang Punggung Negara**



Pajak Kita, Energi Generasi Juara

"Juara tidak lahir dari ruang hampa. Ada bahan bakar tak terlihat yang mencetak mereka."



Generasi Emas Indonesia Cerdas dan Sadar Pajak

01 Mengembangkan potensi diri peserta didik untuk memiliki **kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan** yang diperlukan dirinya dan masyarakat



Generasi Emas Indonesia Cerdas dan Sadar Pajak

02 Mewujudkan generasi muda sebagai pelaku ekonomi yang sadar dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki **budaya** dan **karakter berwawasan kebangsaan**, **cinta tanah air**, **bela negara termasuk kesadaran pajak**



Mengenal PAJAK Lebih Dalam



Tunggu sebentar, tahukah kamu?

Pajak itu ada hari **ulang tahun**nya lho.

Sejarah **HARI PAJAK**



*Gambar: **Radjiman Wedyodiningrat** saat menjabat sebagai Ketua BPUPKI*



*Gambar: **Gedung Volksraad pada tahun 1925,** sekarang menjadi Gedung Pancasila*

2 Juni – 9 Juli 1945

Masa reses sidang BPUPKI, dalam sebuah sidang panitia kecil yang bidang keuangan yang berlangsung pada masa reses tersebut, Ketua BPUPKI Radiman Wadyodiningrat menyebut kata pajak untuk pertama kalinya dalam satu dari lima butir usulannya **"Pemungutan pajak harus diatur hukum"**

10 – 17 Juli 1945

BPUPKI mengadakan sidang kedua Panitia Kecil BPUPKI yang mengagendakan tiga bahasan, yaitu:
1. Rapat Panitia Perancang UUD
2. Rapat Bunkakai Keuangan dan Ekonomi
3. Rapat Bunkakai Pembelaan.

14 Juli 1945

Untuk pertama kali kata pajak muncul dalam "Rancangan UUD ke-dua" pada Bab VII HAL KEUANGAN-PASAL 23 menyebutkan pada butir ke-dua: **"Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang"**

16 Juli 1945

Sidang BPUPKI menambahkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara.

14 JULI
HARI
PAJAK

Sejak tanggal **14 Juli 1945** itulah, pajak terus masuk dalam pembahasan BPUPKI dan masuk sebagai pasal penting dalam Undang-undang Dasar Republik 1945. Atas dasar itulah pajak menjadi tulang punggung utama penerimaan negara yang diatur dengan Undang-undang.

14 Juli diperingati sebagai **Hari Pajak**

Pajak Bertutur

Sehari Mengenal, Selamanya Bangga



Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi **Umum**

Coretax Pedia

https://pajak.go.id/**coretaxpedia/**

Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi **SPT Tahunan**

Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube **@DitjenPajakRI**

Salindia *(Slide)*

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/**lapor-tahunan**

Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

https://**spt-simulasi**.pajak.go.id



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfrimasi ke Kring Pajak
1500200

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja

djp

Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store

Play Store

Terima Kasih

Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami

@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id